



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA PHPU 2019

DISAMPAIKAN DALAM ACARA BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN
PERKARA PHPU 2019

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

1

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai



2

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Perseorangan Melalui DPP Partai



3

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPD



4

Pengajuan Permohonan Online Calon Presiden dan Wakil Presiden



5

Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu



6

Tempat Duduk Sidang



7

Case Retrieval dan Case Tracking Perkara



8

Fasilitas Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)



PENDAHULUAN

“ UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM pasal 466
“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”

UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM pasal 474 ayat (1)
“Dalam Hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”

UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM pasal 475 ayat (1)
“Dalam Hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU”

”

PENDAHULUAN

“

Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi sesuai kewenangannya:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 (PMK 18/2009) tentang “Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)”

”

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“

Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (Permohonan Elektronik / *Electronic Filing*), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”

”

Target Pemahaman dalam Bimtek penanganan perkara berbasis elektronik sbb:

- ✓ Mendapatkan Informasi Kemudahan Akses Dalam Berperkara di MK
- ✓ Peran selaku Kuasa Pemohon
 - ✓ Capres/Cawapres,
 - ✓ DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
 - ✓ DPD
- ✓ Peran selaku Kuasa Termohon
- ✓ Peran selaku Kuasa Terkait
- ✓ Peran selaku Kuasa Bawaslu
- ✓ Informasi dan Layanan Online yang Update

Kemudahan Akses Berperkara di MK

- ✓ Database Kuasa Hukum
- ✓ Pengiriman Dokumen Digital MK ke Kuasa dan Para Pihak melalui email Para Pihak
- ✓ Data Dashboard PHP Pemilu Online
- ✓ Pengajuan Permohonan secara Online
- ✓ Pengajuan Permohonan Offline/Hadir di MK dengan sistem antrian berbasis elektronik
- ✓ Layanan Pojok Digital Mandiri di Gedung MK
- ✓ Live Digitalisasi Online Dokumen Perkara
- ✓ Persidangan Jarak Jauh
- ✓ Streaming Persidangan MK
- ✓ Case Tracking
- ✓ Case Retrieval
- ✓ Click MK
- ✓ Konsultasi dan Tanya Jawab Online
- ✓ Produk Administrasi Kepaniteraan MK sudah bersertifikasi elektronik sehingga tidak bisa dipalsukan
- ✓ Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang
- ✓ Hubungi MK
- ✓ Pengaduan ke MK

Persiapan Sebuah Permohonan Online

- ✓ Paket Internet
- ✓ Smartphone
- ✓ Dekstop/Notebook
- ✓ Camera Photo Smartphone
- ✓ E-Mail di smartphone dan Dekstop
- ✓ Whatsapp Web
- ✓ Hotspot Seluler 4G
- ✓ KTP
- ✓ Alamat Email
- ✓ Nomor HP
- ✓ Daftar Kuasa Hukum jika menggunakan kuasa
- ✓ Digitalisasi Materi Permohonan
- ✓ Dipersiapkan oleh DPP Partai Politik dan Dapat dibantu oleh seluruh DPD Partai Politik

Login Online PHPU Calon Legislatif, dan Capres/Cawapres

- ✓ PHPU DPR, DPRD Prop, DPRD Kab/Kot, Perseorangan login DPP Partai Politik
- ✓ PHPU Dewan Perwakilan Daerah login Kuasa dan atau principle
- ✓ PHPU Capres/Cawapres Login Kuasa dan atau Principle

Kuasa Pemohon/Terkait

- ✓ PHPU DPR, DPRD Prop, DPRD Kab/Kot, Perseorangan
- ✓ PHPU Dewan Perwakilan Daerah
- ✓ PHPU Calon Presiden dan Wakil Presiden

Catatan Login:

- ✓ Login dengan profile Kuasa hanya untuk PHPU Dewan Perwakilan Daerah dan PHPU Capres/Cawapres
- ✓ PHPU DPR, DPRD Prop, DPRD Kab/Kot, Perseorangan melalui Collaborasi dengan DPP Partai Politik

Kuasa Termohon

- ✓ PHPU DPR, DPRD Prop, DPRD Kab/Kot, Perseorangan
- ✓ PHPU Dewan Perwakilan Daerah
- ✓ PHPU Calon Presiden dan Wakil Presiden

Kuasa Bawaslu

- ✓ PHPU DPR, DPRD Prop, DPRD Kab/Kot, Perseorangan
- ✓ PHPU Dewan Perwakilan Daerah
- ✓ PHPU Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pentingnya e-mail dan Nomor HP Para Pihak

Email Para Pihak akan senantiasa rutin mendapatkan Dokumen Administrasi Kepaniteraan dan Dokumen Hukum Mahkamah Konstitusi:

- ✓ Mendapatkan login untuk mengajukan permohonan online dan mendapatkan Tanda Terima Online
- ✓ Mendapatkan Dokumen Administrasi Kepaniteraan MK: Akta Penerimaan Permohonan Pemohon, Akta Permohonan Lengkap/Belum Lengkap, Akta Registrasi Perkara, Pemberitahuan Sidang Pertama, Penyampaian Jadwal Sidang, Penyampaian Salinan Permohonan, Penyampaian Jawaban Termohon, Penyampaian Keterangan Pihak Terkait, Penyampaian Salinan Putusan
- ✓ Seluruh dokumen produk MK telah menggunakan sertifikasi dan tanda tangan elektronik

Pentingnya Nomor HP Para Pihak

- ✓ Sebagai media komunikasi yang handal antara Juru Panggil MK dengan Para Pihak

Pentingnya Sempel

- ✓ Memberikan Kemudahan Para Pihak dalam mengajukan permohonan online di MK
- ✓ Menyimpan semua dokumen permohonan dan tanda terima permohonan
- ✓ Menyimpan tracking permohonan, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait
- ✓ Media untuk mendaftarkan tempat duduk di ruang sidang dan plotting kehadiran para pihak di MK secara online
- ✓ Sempel senantiasa always on dan siap dientry kapanpun dan tidak pernah ada penolakan terkait waktu.

Pentingnya Sempel

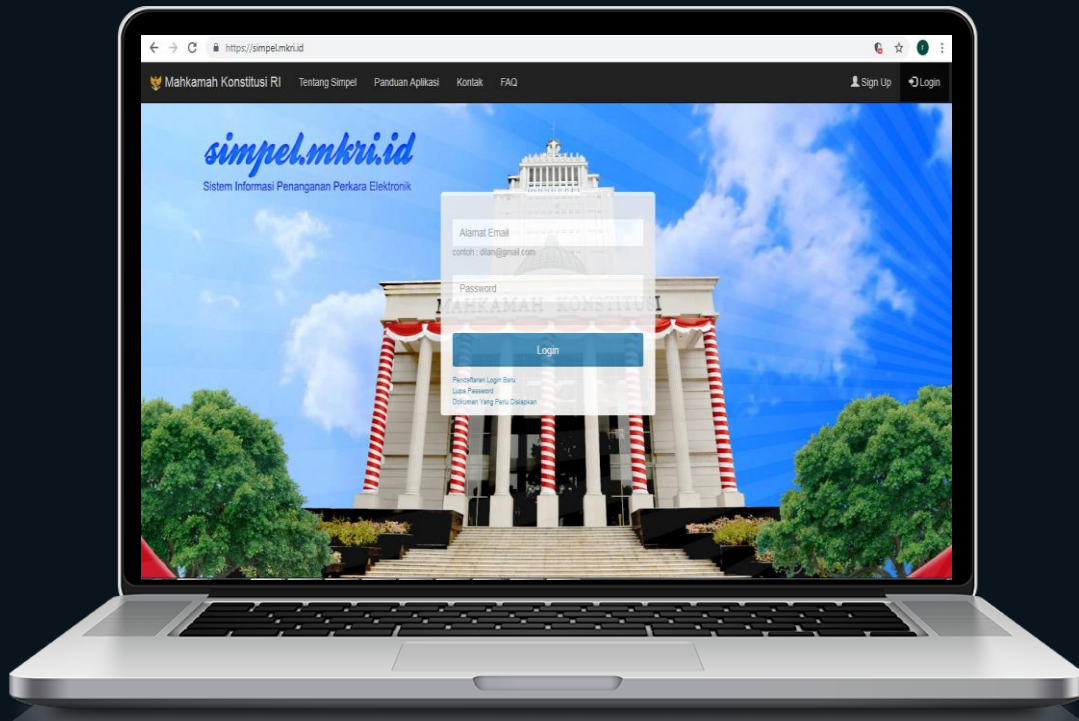
- ✓ Memberikan Kemudahan Para Pihak dalam mengajukan permohonan online di MK
- ✓ Menyimpan semua dokumen permohonan dan tanda terima permohonan
- ✓ Menyimpan tracking permohonan, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait
- ✓ Media untuk mendaftarkan tempat duduk di ruang sidang dan plotting kehadiran para pihak di MK secara online
- ✓ Sempel senantiasa always on dan siap dientry kapanpun dan tidak pernah ada penolakan terkait waktu.

Pengajuan Permohonan Hadir di MK (Offline)

- ✓ Menyiapkan Dokumen Permohonan Per Propinsi
- ✓ Mengisi dan mendapatkan NUPP
- ✓ Memilih Para Pihak (Capres/Cawapres, Partai Politik (Parpol), Dewan Perwakilan Daerah (DPD)).
- ✓ Memilih Propinsi
- ✓ Masukkan NIK dan Nomor HP
- ✓ Foto Diri
- ✓ Mendapatkan Waktu Permohonan
- ✓ Menunggu Panggilan Antrian

SIMPEL

(SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ONLINE)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik”



- 1. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai**

Permohonan PHPU
DPR/DPRD Tahun 2019



Permohonan PHPU
DPD Tahun 2019

Permohonan PHPU
Presiden dan Wakil
Presiden





a. **PENDAFTARAN
PERMOHONAN PHPU
ANGGOTA DPR/DPRD
MELALUI DPP PARTAI**

b. **PENDAFTARAN PERMOHONAN
PHPU ANGGOTA DPR/DPRD
MELALUI PERSEORANGAN**

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

DPP partai politik harus mendaftarkan pada SIMPEL untuk mendapatkan akun log in DPP Partai Politik. Langkah berikutnya DPP Parta Politik akan mengisi profile DPP Partai Politik

PMK No. 2 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1):

“Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”

PMK Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (2):

“Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan”

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

RI [Tentang Simpel](#) [Panduan Aplikasi](#) [Kontak](#) [FAQ](#)

PENDAFTARAN AKUN DPP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019

Partai Politik :
Pilih Pargol

Nama Ketua/Sejenisnya
Nama Ketua Partai Politik

NIK
Nik Ketua Partai Politik

Nama Sekjen/Sejenisnya
Nama Sekjen Partai Politik

NIK
Nik Sekjen Partai Politik

Alamat Partai
Alamat

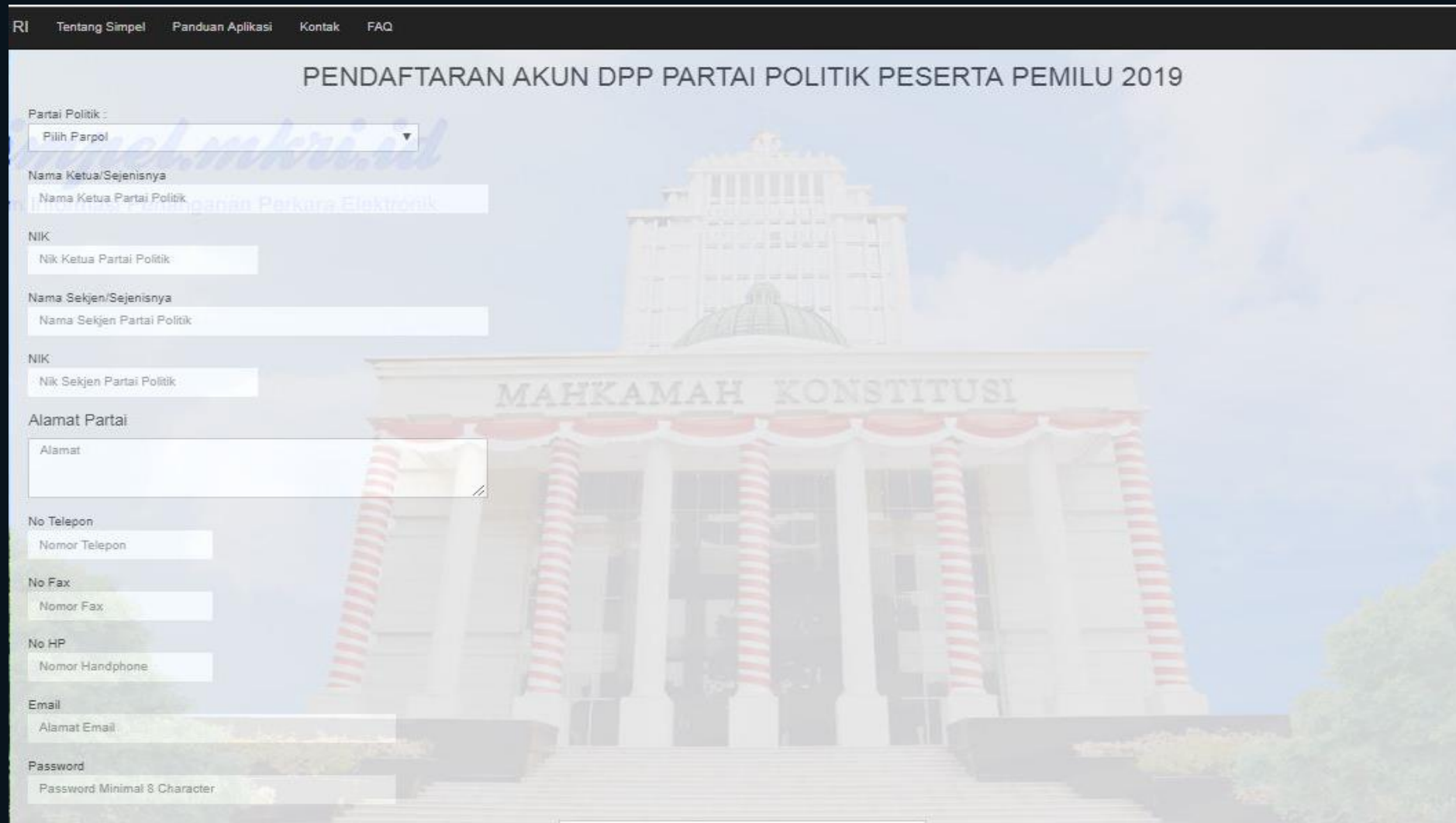
No Telepon
Nomor Telepon

No Fax
Nomor Fax

No HP
Nomor Handphone

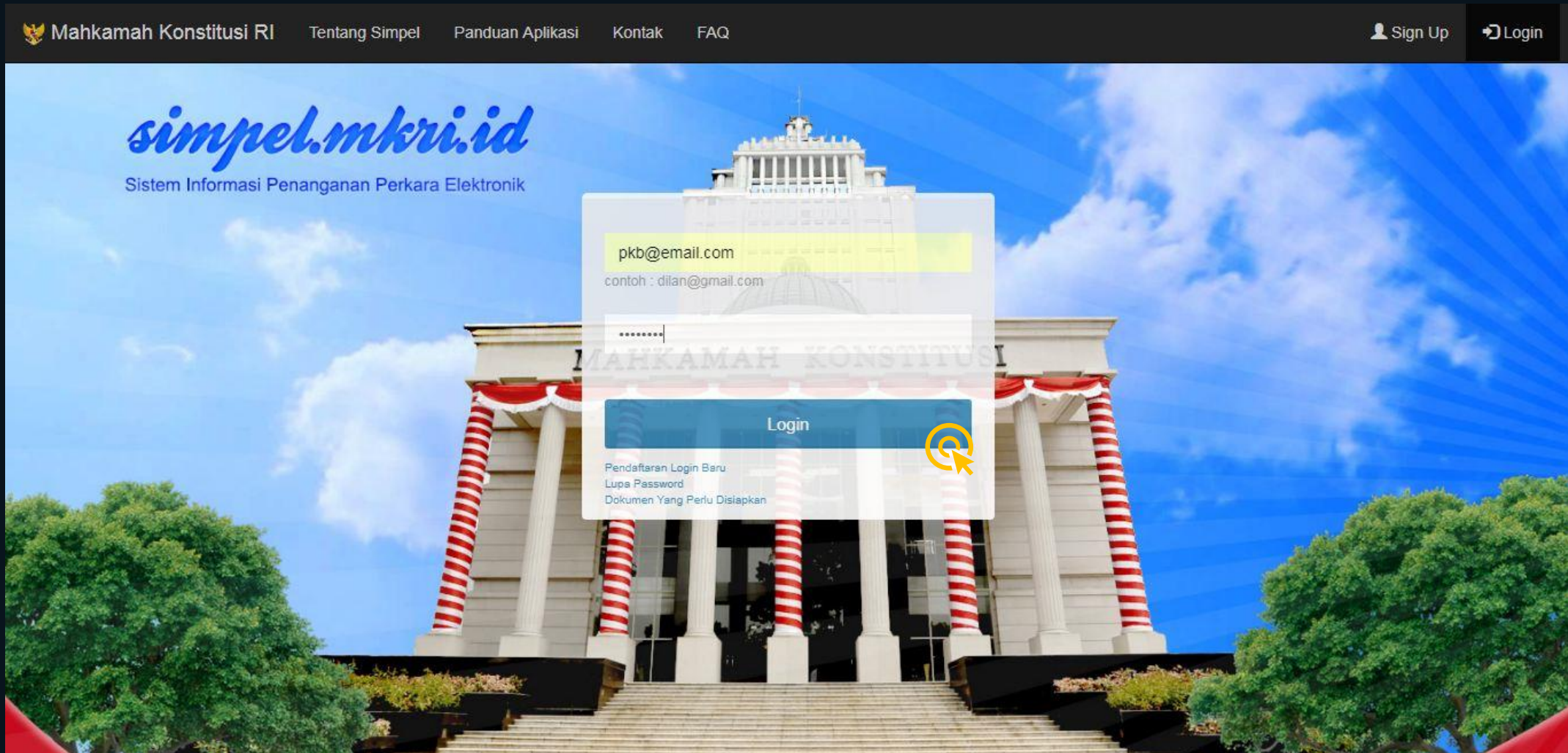
Email
Alamat Email

Password
Password Minimal 8 Character



Form pendaftaran akun DPP partai politi peserta pemilu 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai



Login setelah daftar akun sebagai DPP Partai Politik

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo and the user's email address, pkb@email.com. The left sidebar contains a menu with the following items: Dashboard, Pileg 2019 (with sub-items: Pengajuan Permohonan, Pengajuan Perorangan, Informasi Permohonan), Kunjungan Sidang, Informasi Perkara, Kuasa Hukum, Dewan Pimpinan Daerah, and Bantuan. The main content area displays the title 'Perkara Pemilu Legislatif 2019' and a prominent blue button labeled 'Permohonan' with a magnifying glass icon over it, indicating the focus of the document.

DPP Partai Politik setelah *log in* pada tampilan utama, dapat mendaftarkan pengajuan permohonan 34 provinsi, memilih kuasa hukum lebih dari 1, serta membuat akun sesuai dengan DPD Partai Politik;

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar is blue and contains the SIMPEL logo, a user profile icon for 'pkb@email.com', and a hamburger menu icon. The left sidebar is dark grey and lists various navigation options: Dashboard, Pileg 2019 (with sub-items: Pengajuan Permohonan, Pengajuan Perorangan, Informasi Permohonan), Kunjungan Sidang, Informasi Perkara, Kuasa Hukum, Dewan Pimpinan Daerah, and Bantuan. The main content area has a white background and features the title 'Permohonan Online' followed by 'Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPRD'. Below this is a breadcrumb trail: 'Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan'. The central focus is a large heading 'PERMOHONAN ONLINE PERKARA PEMILU LEGISLATIF'. Below the heading is a paragraph of text explaining the ticket process: 'Tanggal dan jam saat pembuatan tiket digunakan sebagai tanggal dan jam pengajuan permohonan yang akan dicatat di dalam APPP (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon), tiket berlaku selama 1x24 jam sejak tiket buat, anda diharuskan mengisi kelengkapan data-data permohonan per Provinsi yang telah dipilih sebelum masa berlaku tiket habis.' At the bottom of this text is a blue button labeled 'Buat Tiket Pengajuan Permohonan' with a yellow circular icon containing a magnifying glass and a cursor pointing to it.

Waktu pembuatan tiket adalah waktu yang dicatat dalam pengajuan permohonan (APPP). Pemohon dapat melengkapi permohonan dalam waktu 1 x 24 jam setelah pembuatan tiket. Tiket akan hilang secara

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a menu icon, and the user profile 'pkb@email.com'. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Pileg 2019, Kunjungan Sidang, Informasi Perkara, Kuasa Hukum, Dewan Pimpinan Daerah, and Bantuan. A date and time display shows 'Rabu, 26 September 2018 21:55:25'. The main content area is titled 'PILIH PROVINSI YANG BERSENGKETA' and displays a grid of 30 provinces, each with a checkbox and a mouse cursor hovering over the 'Papua Barat' option. A 'Simpan' button is located at the bottom left of the main content area.

SIMPEL pkb@email.com Online

Dashboard
Pileg 2019
Kunjungan Sidang
Informasi Perkara
Kuasa Hukum
Dewan Pimpinan Daerah
Bantuan

Rabu, 26 September 2018 21:55:25

PILIH PROVINSI YANG BERSENGKETA

<input type="checkbox"/> Aceh	<input type="checkbox"/> Sumatera Utara (Sumut)	<input type="checkbox"/> Sumatera Barat (Sumbar)
<input type="checkbox"/> Riau	<input type="checkbox"/> Jambi	<input type="checkbox"/> Sumatera Selatan (Sumsel)
<input type="checkbox"/> Kepulauan Bangka Belitung	<input type="checkbox"/> Bengkulu	<input type="checkbox"/> Lampung
<input type="checkbox"/> Kepulauan Riau	<input type="checkbox"/> Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)	<input type="checkbox"/> Jawa Barat (Jabar)
<input type="checkbox"/> Jawa Tengah (Jateng)	<input type="checkbox"/> Jawa Timur (Jatim)	<input type="checkbox"/> Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
<input type="checkbox"/> Banten	<input type="checkbox"/> Bali	<input type="checkbox"/> Nusa Tenggara Barat (NTB)
<input type="checkbox"/> Nusa Tenggara Timur (NTT)	<input type="checkbox"/> Kalimantan Barat (Kalbar)	<input type="checkbox"/> Kalimantan Tengah (Kalteng)
<input type="checkbox"/> Kalimantan Selatan (Kalsel)	<input type="checkbox"/> Kalimantan Timur (Kaltim)	<input type="checkbox"/> Kalimantan Utara (Kaltara)
<input type="checkbox"/> Sulawesi Utara (Sulut)	<input type="checkbox"/> Sulawesi Tengah (Sulteng)	<input type="checkbox"/> Sulawesi Selatan (Sulsel)
<input type="checkbox"/> Sulawesi Barat (Sulbar)	<input type="checkbox"/> Sulawesi Tenggara (Sultra)	<input type="checkbox"/> Gorontalo
<input type="checkbox"/> Maluku	<input type="checkbox"/> Maluku Utara (Malut)	<input type="checkbox"/> Papua
<input type="checkbox"/> Papua Barat		

Simpan

DPP Partai Politik memilih Provinsi yang menjadi objek perselisihan hasil pemilu

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot displays the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'pkb@email.com', and a breadcrumb trail: 'Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan'. The left sidebar contains a menu with items: 'Dashboard', 'Pileg 2019' (with sub-items 'Pengajuan Permohonan', 'Pengajuan Perorangan', and 'Informasi Permohonan'), 'Kunjungan Sidang', 'Informasi Perkara', 'Kuasa Hukum', 'Dewan Pimpinan Daerah', and 'Bantuan'. The main content area is titled 'Permohonan Online' and 'Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPRD'. It features a prominent announcement: 'Tanggal Tiket 27-09-2018 pukul 10:01 WIB' and 'Tiket berlaku sampai tanggal 28-09-2018 pukul 10:01 WIB'. Below this, a message states: 'Anda harus melengkapi data permohonan per Provinsi sebelum masa berlaku tiket habis.' A list of provinces is shown in input fields: '1. Aceh', '2. Riau' (with a yellow cursor icon), and '3. Kepulauan Bangka Belitung'.

Contoh DPP Partai Politik telah memilih 3 Provinsi yang menjadi objek perselisihan hasil pemilu pada 27

September 2018 pukul 10.01

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

SIMPEL pkb@email.com Online

Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan > Permohonan Online

Permohonan Online

Perselisihan Pemilihan Legislatif DPR/DPRD Tahun 2019

Provinsi: Riau

Menunjuk Kuasa: TIDAK

Pemohon

Partai Politik:	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Nama Ketua:	RUDI
Nama Sekjen:	ALEX
Alamat:	11alamat
Email:	dpd@email.com
Nomor Telepon:	11
Nomor Handphone:	11

Permohonan

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Riau Tahun 2019

[Simpan Sementara](#) [Selanjutnya](#)

DPP Partai melengkapi isian aplikasi PHPU DPR/DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'pkb@email.com', and a breadcrumb trail: Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan > Permohonan Online. The main content area is titled 'Permohonan Online' and 'PERSelisihan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPRD'. Below this, the user is prompted to 'PILIH DAERAH PEMILIHAN YANG BERSENGKETA DAPIL ANGGOTA DPR'. There are two rows of selection boxes. The first row contains 'Riau I' and 'Riau II', both with 'Partai Terkait' labels. The second row, titled 'DAPIL ANGGOTA DPRD', contains eight boxes labeled 'Riau 1' through 'Riau 8', each with a 'Partai Terkait' label. At the bottom of the selection area are two buttons: 'Sebelumnya' (orange) and 'Selanjutnya' (blue). The left sidebar contains navigation links for Dashboard, Pileg 2019, Kunjungan Sidang, Informasi Perkara, Kuasa Hukum, Dewan Pimpinan Daerah, and Bantuan. A date and time display shows 'Rabu, 26 September 2018 22:10:21'.

DPP Partai Politik memilih pihak terkait sesuai dapil DPR/DPRD yang hendak diajukan permohonan

PHPU DPR/DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot displays the SIMPEL web application interface. The main content area shows a form titled "PILIH PARTAI POLITIK TERKAIT" (Select Related Political Party). The form contains a grid of 15 checkboxes, each corresponding to a political party. The "Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)" checkbox is selected. At the bottom of the form, there are two buttons: "Tutup" (Close) and "Simpan" (Save).

The background dashboard includes a sidebar menu with the following items: Dashboard, Pileg 2019, Kunjungan Sidang, Informasi Perkara, Kuasa Hukum, Dewan Pimpinan Daerah, and Bantuan. The top navigation bar shows the user's email address "pkb@email.com" and the application name "SIMPEL".

**Rabu, 26
September 2018
22:11:10**

DPP Partai Politik melakukan pemilihan pihak terkait PPHU DPR/DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

SIMPEL pkb@email.com Online

Dashboard

Pileg 2019

- Pengajuan Permohonan
- Pengajuan Perorangan
- Informasi Permohonan

Kunjungan Sidang

Informasi Perkara

Kuasa Hukum

Dewan Pimpinan Daerah

Bantuan

Rabu, 26
September 2018
22:11:56

Permohonan Online Perselisihan Pemilihan Legislatif DPR

Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan > Permohonan Online

Berkas Permohonan Online

Upload Berkas Permohonan

KTP Pemohon	<input type="text" value="Choose File"/> No file chosen	<input type="button" value="Upload"/>
	*)File harus dengan ekstensi (.jpg/.png/.gif) dan Ukuran file maksimal : 1 MB	
Permohonan	<input type="text" value="Choose File"/> No file chosen	<input type="button" value="Upload"/>
	*) File harus dengan ekstensi (.pdf) file maksimal : 3 MB	
Daftar Alat/Dokumen Bukti	<input type="text" value="Choose File"/> No file chosen	<input type="button" value="Upload"/>
	*) File harus dengan ekstensi (.doc/.docx/.xls/.xlsx) dan ukuran file maksimal : 1 MB	
Surat Keputusan Termohon	<input type="text" value="Choose File"/> No file chosen	<input type="button" value="Upload"/>
	*) File harus dengan ekstensi (.pdf) dan ukuran file maksimal : 5 MB	
Surat Referensi Partai	<input type="text" value="Choose File"/> No file chosen	<input type="button" value="Upload"/>
	*) File harus dengan ekstensi (.pdf) dan ukuran file maksimal : 3 MB	

DPP Partai Politik melakukan proses upload / unggah berkas permohonan PHPU DPR/DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

SIMPEL pkb@email.com pkb@email.com

pkb@email.com Online

- Dashboard
- Pileg 2019
- Kunjungan Sidang
- Informasi Perkara
- Kuasa Hukum
- Dewan Pimpinan Daerah
- Bantuan

Rabu, 26 September 2018
22:12:39

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id


TANDA TERIMA PERMOHONAN ONLINE
Nomor Online : 2

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Riau Tahun 2019

Pemohon : Partai Kebangkitan Bangsa PKB

Kuasa Pemohon :

Tanggal : 26 September 2018 Pukul : 21:53 WIB



CETAK

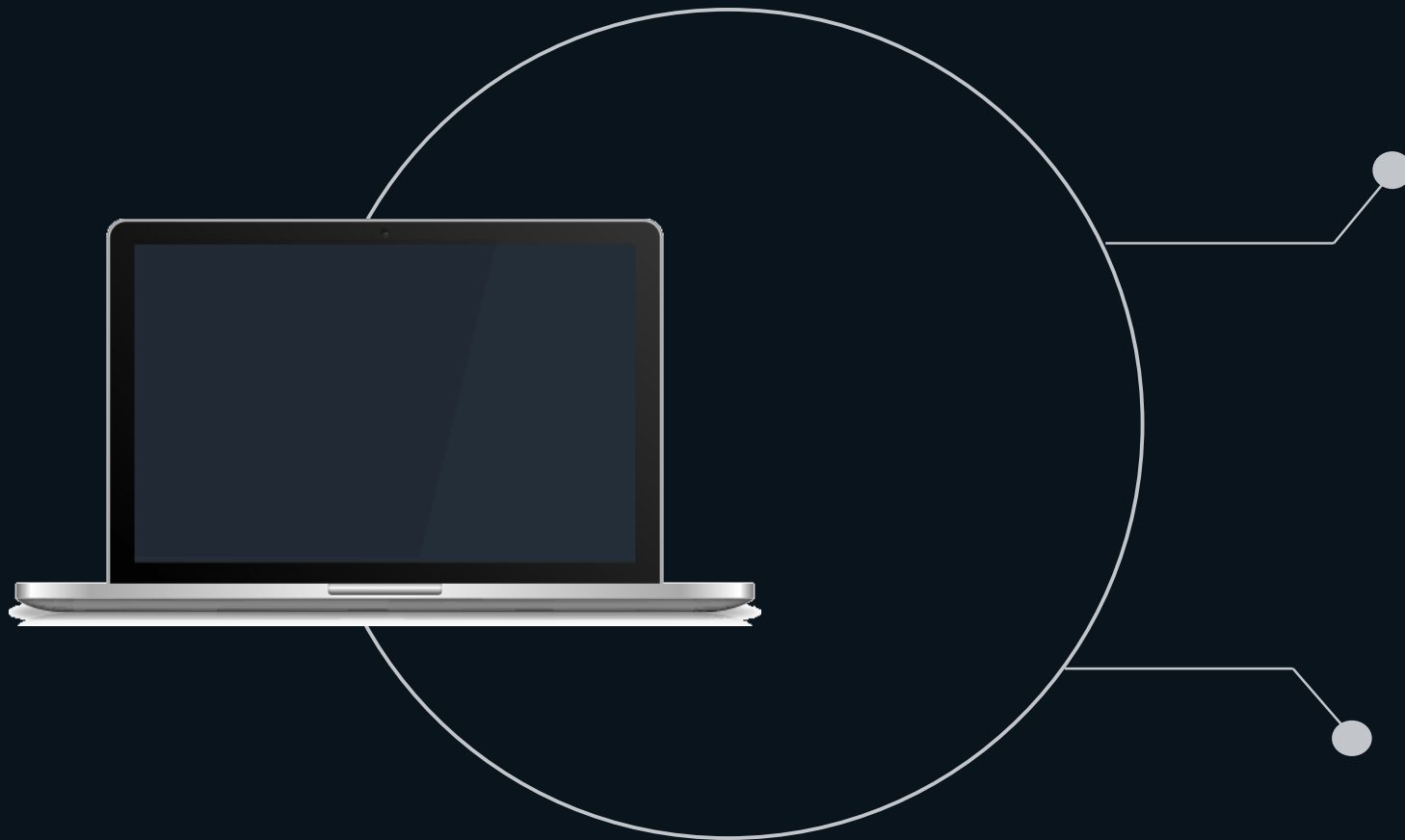
NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	TIDAK ADA
2	KTP Pemohon	ADA
3	Keputusan Termohon	TIDAK ADA
4	Daftar Alat/Dokumen Bukti	TIDAK ADA
5	Surat Referensi Partai	TIDAK ADA
6	Surat Kuasa	TIDAK ADA
7	KTP Kuasa	TIDAK ADA

Panitera Pemohon

DPP Partai Politik mendapatkan tanda terima online permohonan PHPU DPR/DPRD Tahun 2019



2. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Perseorangan Melalui DPP Partai



a. PENDAFTARAN
PERMOHONAN PHPU
ANGGOTA DPR/DPRD
MELALUI DPP PARTAI

b. PENDAFTARAN PERMOHONAN
PHPU ANGGOTAL DPR/DPRD
PERSEORANGAN MELALUI DPP
PARTAI POLITIK



Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui Perseorangan

Terhadap permohonan perseorangan, maka perseorangan caleg yang bersangkutan harus menghubungi DPP Partai Politik untuk didaftarkan melalui aplikasi SIMPEL.MKRI.ID .

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui Perseorangan

SIMPEL pkb@email.com

pkb@email.com
Online

- Dashboard
- Pileg 2019
 - Pengajuan Permohonan
 - Pengajuan Perorangan
 - Informasi Permohonan
- Kunjungan Sidang
- Informasi Perkara
- Kuasa Hukum
- Dewan Pimpinan Daerah
- Bantuan

**Kamis, 27
September 2018
19:02:21**

Provinsi	Jawa Barat (Jabar)
Pemilihan	DPR
Dapil	Jabar II
Nama Calon	Calon 689
Menunjuk Kuasa	TIDAK

Identitas Pemohon

Nomor KTP	4123123123123123
Nama	Calon 689
Alamat	Jalan Meda Merdeka
Email	setiawan.heru69@gmail.com
Nomor Telepon	0888888888
Nomor Faksimili	0888888889
Nomor Handphone	

Permohonan

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dapil Jabar II Tahun 2019

[Simpan Sementara](#) [Upload Berkas](#)

Form pengisian pengajuan permohonan online secara perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Perseorangan

SIMPEL pkb@email.com Online

Dashboard
Pileg 2019
Kunjungan Sidang
Informasi Perkara
Kuasa Hukum
Dewan Pimpinan Daerah
Bantuan

**Kamis, 27
September 2018
19:02:58**


Tanda Terima Permohonan Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Permohonan Online CETAK

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

TANDA TERIMA PERMOHONAN ONLINE
Nomor Online : 1/PAN.ONLINE/DPR-DPRD/2019

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR Provinsi Jawa Barat Jabar Dapil Jabar II Tahun 2019
Pemohon : Calon 689
Kuasa Pemohon :
Tanggal : 27 September 2018 Pukul : 19:03 WIB



NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	TIDAK ADA
2	KTP Pemohon	TIDAK ADA
3	Keputusan Termohon	TIDAK ADA
4	Daftar Alat/Dokumen Bukti	TIDAK ADA
5	Surat Referensi Partai	TIDAK ADA
6	Surat Kuasa	TIDAK ADA
7	KTP Kuasa	TIDAK ADA

Panitera
TTD
Kasianur Sidauruk

Pemohon
Calon 689


Catatan :
1. Tanda terima permohonan online ini bukan bukti bahwa permohonan telah diregistrasi.
2. Pemohon dapat melengkapi berkas permohonan dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan masing-masing 4 rangkap agar dapat diperiksa syarat kelengkapannya.
3. Apabila yang menyerahkan hakoa pemohon atau kuasa hukumnya harus ada surat kuasa untuk menyerahkan berkas.

Tanda terima permohonan online



3. Pengajuan Permohonan Online Perselisihan Calon Anggota DPD;

Permohonan PHPU
DPR/DPRD Tahun 2019

Permohonan PHPU
DPD Tahun 2019 

Permohonan PHPU
Presiden dan Wakil
Presiden



Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPD

PMK No. 3 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (1)

“Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.”

PMK No. 3 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1)

“Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.”

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPD

SIMPEL mazmur.alexander@gmail.com

Permohonan Online Persisihan Pemilihan Legislatif DPD Pileg 2019 Permohonan Pemohon

Permohonan Online

Provinsi: Aceh

Nama Calon: ANDRI LISKA, S.I.Kom.

Menunjuk Kuasa: TIDAK

Identitas Pemohon

Nomor KTP: 1231233123123212

Nama: ANDRI LISKA, S.I.Kom.

Alamat: Jalan medan merdeka

Email: andri@email.com

Nomor Telepon: 09801899832

Nomor Handphone: 0881111111

Permohonan

Persisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPD Provinsi Aceh Tahun 2019

Pemohon melakukan permohonan dengan mengisi form, nama calon sudah terdaftar pada database kemudian upload berkas

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPD

SIMPEL mazmur.alexander@gmail.com

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (82-21) 23529000, Faksimile (82-21) 3524281, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id


TANDA TERIMA PERMOHONAN ONLINE
Nomor Online : 1/PAN.ONLINE/DPD/2019

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPD Provinsi Aceh Tahun 2019

Pemohon : ANDRI LISKA, S.I.Kom.

Kuasa Pemohon :

Tanggal : **27 September 2018** Pukul : 15:00 WIB



NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	TIDAK ADA
2	KTP Pemohon	TIDAK ADA
3	Keputusan Termohon	TIDAK ADA
4	Daftar Alat/Dokumen Bukti	TIDAK ADA
5	Alat/Dokumen Bukti	TIDAK ADA
6	Surat Kuasa	TIDAK ADA
7	KTP Kuasa	TIDAK ADA

Panitera: TTD Kasionur Sidaunuk
Pemohon: ANDRI LISKA, S.I.Kom.

Kamis, 27 September 2018 15:01:15

Setelah melakukan pengisian form dan upload berkas pemohon akan mendapatkan tanda terima permohonan online



**4. Pengajuan Permohonan Online Perselisihan
Presiden dan Wakil Presiden;**

Permohonan PHPU
DPR/DPRD Tahun 2019

Permohonan PHPU
DPD Tahun 2019

Permohonan PHPU
Presiden dan Wakil
Presiden



Pengajuan Permohonan Online Presiden dan Wakil Presiden

PMK No. 4 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (1)

“Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.”

PMK No. 4 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1)

“Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan daring (online) paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.”

Pengajuan Permohonan Online Presiden dan Wakil Presiden

The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar is blue and contains the SIMPEL logo on the left, a hamburger menu icon in the center, and the user's email address 'mazmur.alexander@gmail.com' on the right. Below the navigation bar, the main content area is white. On the left side, there is a dark grey sidebar menu with various options: Dashboard, Pilkada, PUU, Informasi Perkara, Kunjungan Sidang, Bantuan, Pileg 2019 (Beta), and Pemilihan Presiden. The 'Pemilihan Presiden' option is circled in red. The main content area displays the 'Dashboard' page for 'SIMPEL.MKRI.ID'. It features a header with the user's email and a 'Dashboard' link. Below the header, there are two tabs: 'Perkara PUU' (selected) and 'Perkara PHP KADA'. The main content area shows a section titled 'Perkara PUU' with a blue button labeled 'Permohonan'.

Tampilan untuk pengajuan perselisihan pemilihan presiden dan calon wakil presiden, berbeda dengan pendaftaran akun DPP

Pengajuan Permohonan Online Presiden dan Wakil Presiden

SIMPEL mazmur.alexander@gmail.com

Permohonan Online

Menunjuk Kuasa: TIDAK

Identitas Pemohon

Nama Calon Presiden	Jokowidodo
NIK Calon Presiden	3231231242141241
Nama Calon Wakil Presiden	Bobo Ari
NIK Calon Wakil Presiden	3311233232323123
Alamat	Jalan Medan Merdeka
Email	bobi@email.com
Nomor Telepon	0888882222
Nomor Handphone	0888882222

Permohonan

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2019

Simpan Sementara Upload Berkas

Pemohon melakukan permohonan dengan mengisi form, nama Presiden dan Wakil Presiden dan upload berkas;

Pengajuan Permohonan Online Presiden dan Wakil Presiden

The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pemilu) portal. The user is logged in as mazmur.alexander@gmail.com. The main content area displays the receipt for an online application to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The receipt includes the applicant's name (Jokowidodo & Jokowiwido 2), the date (October 1, 2018), and a list of required documents: 1. PERMOHONAN, 2. DAFTAR ALAT BUKTI, 3. SURAT KEPUTUSAN TERMOHON, 4. KTP CALON PRESIDEN, and 5. KTP CALON WAKIL PRESIDEN. The receipt is signed by the Panitera (Kasianur Sidauruk) and the Pemohon (Jokowidodo & Jokowiwido 2). A QR code is also present for verification.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

TANDA TERIMA PERMOHONAN ONLINE
Nomor Online : 1/PAN.ONLINE/PRESIDEN/2019

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2019
Pemohon : Jokowiwido & Jokowiwido 2
Kuasa Pemohon :
Tanggal : 01 Oktober 2018 Pukul : 12:57 WIB

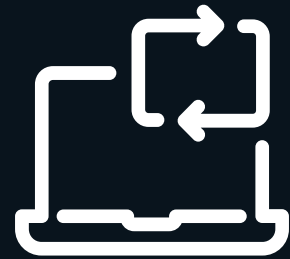
NO.	DOKUMEN YANG DI UPLOAD
1	PERMOHONAN
2	DAFTAR ALAT BUKTI
3	SURAT KEPUTUSAN TERMOHON
4	KTP CALON PRESIDEN
5	KTP CALON WAKIL PRESIDEN

Panitera
TTD
Kasianur Sidauruk

Pemohon
Jokowidodo & Jokowiwido 2

Catatan :
1. Tanda terima permohonan online ini bukan bukti bahwa permohonan telah diregistrasi.
2. Pemohon dapat melengkapi berkas permohonan dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan masing-masing 4 rangkap agar dapat diperiksa syarat kelengkapannya.
3. Apabila yang menyerahkan bukan pemohon atau kuasa hukumnya harus ada surat kuasa untuk menyerahkan berkas.

Setelah melakukan pengisian form dan upload berkas pemohon akan mendapatkan tanda terima permohonan online



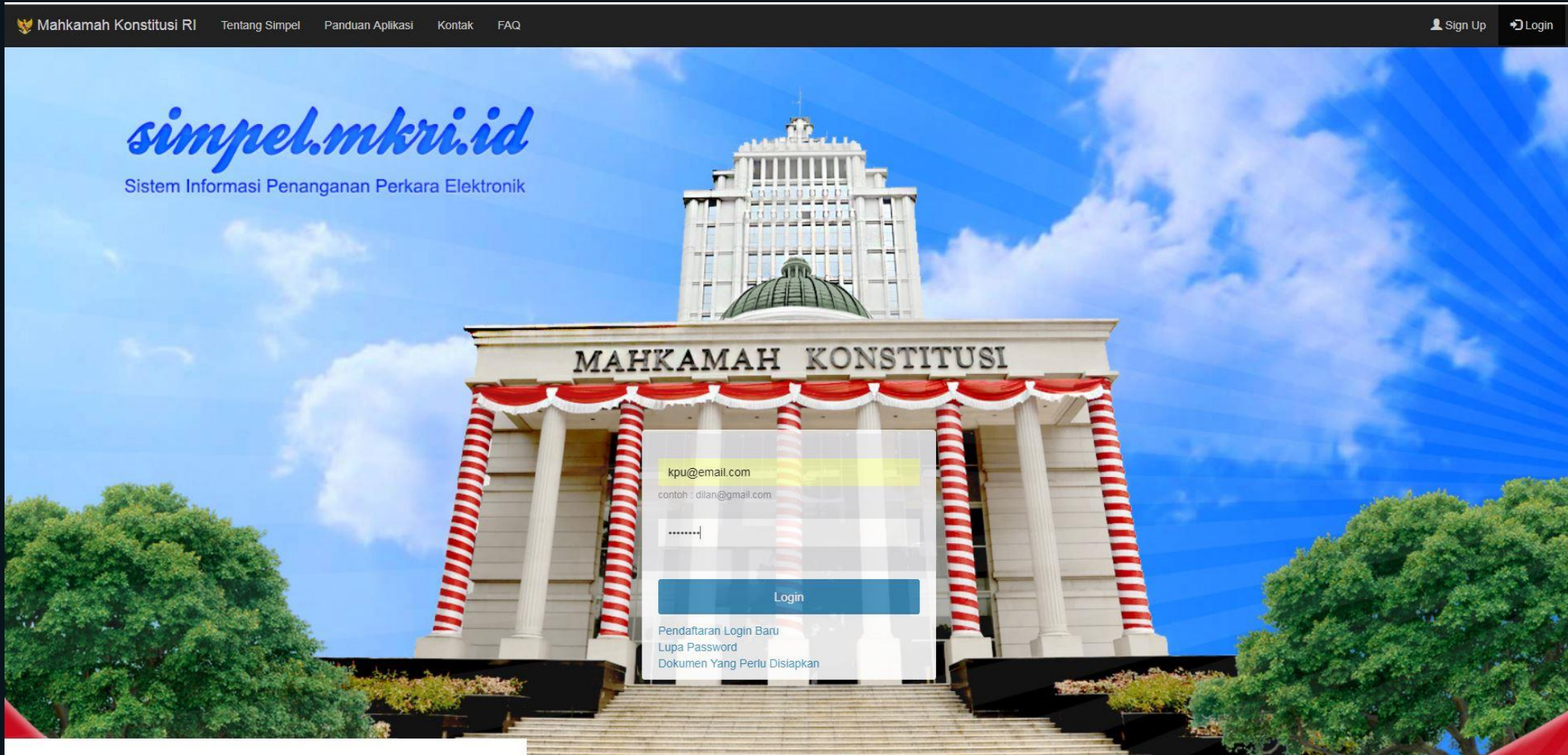
5. JAWABAN TERMOHON

Jawaban Termohon

PMK No 4 tahun 2018 Pasal 15 ayat (1)

“Jawaban termohon diajukan oleh termohon kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan.”

TERMOHON



KPU melakukan log in untuk mencetak jawaban termohon

TERMOHON

SIMPEL kpu@email.com Online

Jawaban Termohon Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dashboard > Permohonan Online > PHPU

Permohonan Online

Jawaban Termohon

Nomor Perkara	2/PAN/DPR-DPRD/2019
Nama Termohon	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
Email Termohon	setiawan.heru69@gmail.com
Pokok Jawaban	Jawaban termohon terhadap perkara nomor 2/PAN/DPR-DPRD/2019
Kuasa Termohon	<u>Heru</u>
Email Kuasa Termohon	setiawan.heru69@gmail.com
Tanggal Surat Kuasa	27-09-2018
Upload Surat Kuasa	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
Upload Jawaban Termohon	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
Upload SK Termohon	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
Upload Daftar Alat Bukti	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen

Kamis, 27
September 2018
18:34:39

Form isian jawaban termohon

TERMOHON

SIMPEL kpu@email.com Online

Dashboard | Pilkada 2018 | Kunjungan Sidang | Informasi Perkara | Pileg 2019

Kamis, 27 September 2018
18:35:41

Tanda Terima Permohonan Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Permohonan Online

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

TANDA TERIMA JAWABAN TERMOHON ONLINE
Nomor Online : 1/PAN/ONLINE/JT/2018

CETAK

Nomor Perkara : 2/PAN/DPR-DPRD/2019
Nama Termohon : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
Pokok Jawaban : Jawaban termohon terhadap perkara nomor 2/PAN/DPR-DPRD/2019
Kuasa Termohon : Heru
Tanggal : 27 September 2018 Pukul : 18:35 WIB

NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1.	JAWABAN TERMOHON	ADA
2.	KEPUTUSAN TERMOHON	TIDAK ADA
3.	SURAT KUASA	TIDAK ADA
4.	DAFTAR ALAT BUKTI	TIDAK ADA

Tanda terima online jawaban termohon, waktu permohonan online



5. KETERANGAN BAWASLU

KETERANGAN BAWASLU

Pasal 29 – 34 PMK No 2 Tahun 2018 (PHPU ANGGOTA DPR/DPRD)

Pasal 29 – 34 PMK No 3 Tahun 2018 (PHPU ANGGOTA DPD)

Pasal 24 – 29 PMK No 4 Tahun 2018 (PHPU Presiden & Wakil Presiden)

Pasal 29 PMK No. 2 Tahun 2018 (PHPU ANGGOTA DPR/DPRD):

“Bawaslu dan/atau jajarannya secara berjenjang bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara PHPU anggota DPR dan DPRD yang terkait dengan Permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah”

Pasal 29 PMK No. 3 Tahun 2018 (PHPU ANGGOTA DPD):

“Bawaslu dan/atau jajarannya secara berjenjang bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara PHPU anggota DPD yang terkait dengan Permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah”

KETERANGAN BAWASLU

Pasal 24 PMK No. 4 Tahun 2018 (PHPU Presiden & Wakil Presiden):

“Bawaslu dan/atau jajarannya secara berjenjang bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan Permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah”

Pasal 30 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2018 (PHPU ANGGOTA DPR/DPRD),

Pasal 30 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2018 (PHPU ANGGOTA DPD), dan

Pasal 25 ayat (1) PMK No. 4 Tahun 2018 (PHPU Presiden & Wakil Presiden):

“Keterangan Bawaslu diajukan ke Mahkamah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan”

KETERANGAN BAWASLU

Pasal 34 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2018 (PHPU ANGGOTA DPR/DPRD),
Pasal 34 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2018 (PHPU ANGGOTA DPD), dan
Pasal 29 ayat (1) PMK No. 4 Tahun 2018 (PHPU Presiden & Wakil
Presiden):

**“ Dalam hal Keterangan Bawaslu diajukan secara *online*,
Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dituangkan
dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi
word (.doc) dan *pdf*”**

Keterangan Bawaslu

simpel.mkri.id

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

MAHKAMAH KONSTITUSI

bawaslu@email.com

contoh : dilan@gmail.com

••••••••

Login


[Pendaftaran Login Baru](#)

[Lupa Password](#)

[Dokumen Yang Perlu Disiapkan](#)

Bawaslu melakukan log in

Keterangan Bawaslu

 **SIMPEL** bawaslu@email.com

bawaslu@email.com Online

- Dashboard
- Pilkada 2018
- Kunjungan Sidang
- Informasi Perkara
- Pileg 2019
 - Permohonan
 - Perkara

Jumat, 19 Oktober 2018
16:29:25

List Perkara SIMPEL_MKRIJD List Perkara


Perkara DPR/DPRD Perkara DPD Perkara Presiden


Perkara

NO PERKARA	TANGGAL	PERMOHONAN	PEMOHON	KUASA	KETERANGAN BAWASLU
2/PAN/DPR-DPRD/2019	19-10-2018 10:48	Pselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sulsel Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat Nasdem		Daftar Keterangan Bawaslu
1/PAN/DPR-DPRD/2019	18-10-2018 18:31	Pselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa PKB		Tanda Terima Keterangan Bawaslu

Bawaslu klik daftar keterangan Bawaslu

Keterangan Bawaslu

 SIMPEL bawaslu@email.com

 bawaslu@email.com Online

- Dashboard
- Pilkada 2018
- Kunjungan Sidang
- Informasi Perkara
- Pileg 2019
 - Permohonan
 - Perkara

Jumat, 19 Oktober 2018
16:31:15

Keterangan Bawaslu Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dashboard > Permohonan Online > PHPU

Permohonan Online

Keterangan Bawaslu

Nomor Perkara	2/PAN/DPR-DPRD/2019
Nama	Badan Pengawas Pemilihan Umum
Email	
Pokok Keterangan	Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap perkara nomor 2/PAN/DPR-DPRD/2019
Upload Keterangan	<input type="button" value="Telusuri..."/> Tidak ada berkas dipilih.
Upload Daftar Alat Bukti	<input type="button" value="Telusuri..."/> Tidak ada berkas dipilih.

Upload Keterangan dan Upload Daftar Alat Bukti

Keterangan Bawaslu

SIMPEL bawastu@email.com

bawastu@email.com Online

Dashboard

Pilkada 2018

Kunjungan Sidang

Informasi Perkara

Pileg 2019

- Permohonan
- Perkara

Jumat, 19 Oktober 2018
16:32:50



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

TANDA TERIMA KETERANGAN BAWASLU ONLINE
Nomor Online : 7/PAN/ONLINE/BAWASLU/2018



CETAK

Nomor Perkara : 2/PAN/DPR-DPRD/2019

Pemberi Keterangan : Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pokok Jawaban : Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap perkara nomor 2/PAN/DPR-DPRD/2019

Tanggal : 19 Oktober 2018 Pukul : 16:33 WIB

NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1.	KETERANGAN	ADA
2.	DAFTAR ALAT BUKTI	ADA

Panitera Bawaslu

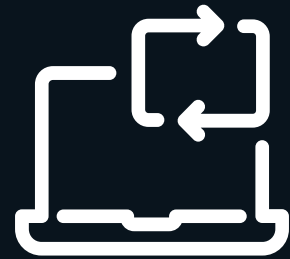
TTD

Kasianur Sidauruk

Catatan :


- Tanda terima keterangan bawaslu online ini bukan sebagai bukti bahwa keterangan telah diregistrasi.
- Bawaslu segera melengkapi keterangan online ini dengan membawa dokumen - dokumen yang di butuhkan ke Mahkamah Konstitusi.
- Apabila yang menyerahkan bukan bawaslu harus ada surat kuasa untuk menyerahkan berkas.
- Abaikan apabila telah menyerahkan dokumen yg dipersyaratkan.

Tanda Terima Keterangan Bawaslu Online



6. Tempat Duduk Sidang;

Jadwal Sidang: Penentuan Tempat Duduk Sidang

 SIMPEL ishak.purnama4@gmail.com

Kunjungan Sidang Jadwal Sidang Dashboard > > Kunjungan Sidang > > Jadwal Sidang

[Jadwal Sidang Pemohon](#)

#	WAKTU SIDANG	NOMOR PERKARA	ACARA SIDANG	KEHADIRAN
1	2018-09-26, 13:30 WIB	61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan	Kehadiran

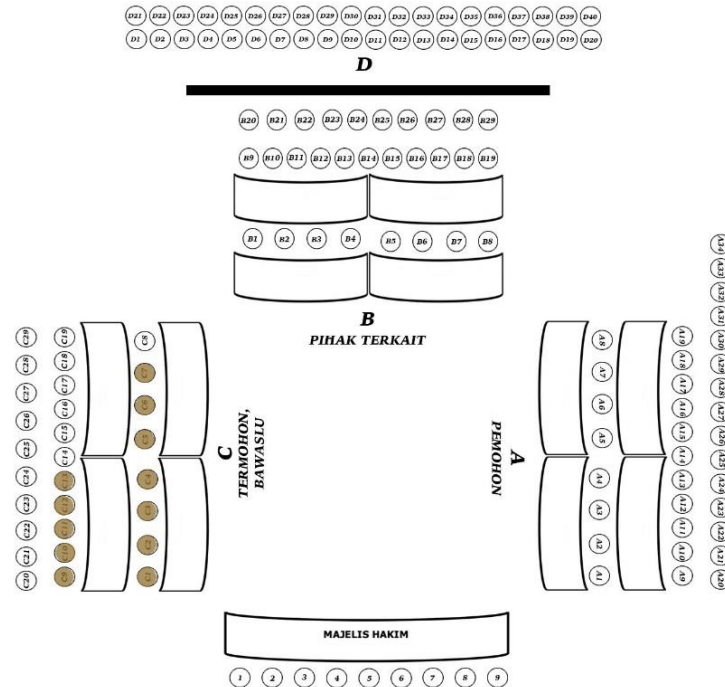
Kamis, 4 Oktober 2018
14:06:58

List jadwal sidang untuk menentukan tempat duduk sidang

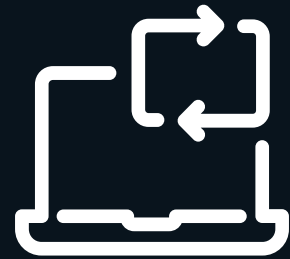
Penentuan Tempat Duduk Sidang

Jadwal Sidang

Nomor Perkara	Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Lokasi
61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan		26-09-2018	13:30	PANEL 3



Denah ruang sidang



7. Tracking Perkara;

Tracking Perkara



Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Monitoring status perkara



8. Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*);

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

Dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain dengan melaksanakan persidangan jarak jauh, yaitu:

- a. mempermudah masyarakat pencari keadilan dan stakeholder mengikuti proses persidangan dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK,
- b. menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.

PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3)

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline.”

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

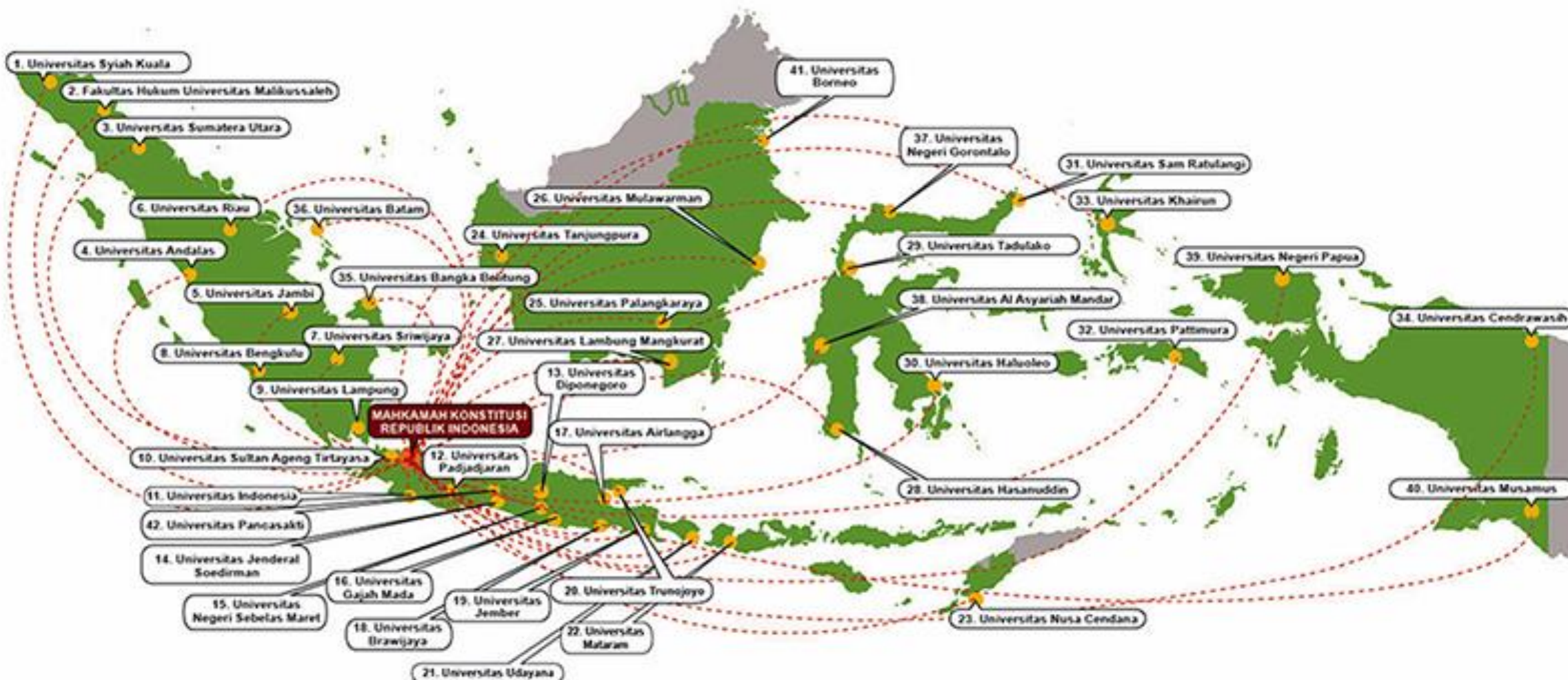
NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
1	FH Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam	12	FH Universitas Padjadjaran	Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung , Jawa Barat 40132
2	FH Universitas Malikussaleh (Provinsi Aceh)	Kampus Bukit Indah, Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141	13	FH Universitas Diponegoro (Jawa Tengah)	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214
3	FH Universitas Sumatera Utara	Jl. Universitas No.4 Padang Bulan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155	14	FH Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
4	FH Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat	15	FH Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
5	FH Universitas Jambi (Kampus Pinang Masak)	Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 363631	16	FH Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
6	FH Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau	17	FH Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
7	FH Universitas Sriwijaya (Sumatera Selatan)	Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km.32 Inderalaya Ogan Ilir30661	18	FH Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	FH Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A	19	FH Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
9	FH Universitas Lampung	Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145	20	FH Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
10	FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang Banten	21	FH Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
11	FH Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat	22	FH Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

PERGURUAN TINGGI		ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
23	FH Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur	33	FH Universitas Khairun (Ternate)	Kampus II Kelurahan Gambesi, Jl. Raya Pertamina KotaK Pos 53 Ternate 97719
24	FH Universitas Tanjungpura	Jl. Jenderal Achmad Yani/Jl. Sosiologi Pontianak Kotak Pos 1049 Kalimantan Barat	34	FH Universitas Cenderawasih	Jl. Kamp Wolker Kampus Baru Waena - Jayapura - Papua 99358
25	FH Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah	35	FH Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
26	FH Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119	36	FH Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
27	FH Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan)	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123	37	FH Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
28	FH Universitas Hasanudin (Sulawesi Selatan)	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Tamalanrea, Makasar 90245	38	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
29	FH Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta KM.9, Palu Sulawesi Tengah - 94118	39	Universitas Negeri Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
30	FH Universitas Haluleo (Sulawesi Tenggara)	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari 93232	40	FISIP Universitas Musamus	Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke
31	FH Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115	41	FH Universitas Borneo	Jl. Amal Lama No 1, Tarakan Kalimantan Utara PO. BOX 170
32	FH Universitas Patimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon	42	FH Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal, Jawa Tengah

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



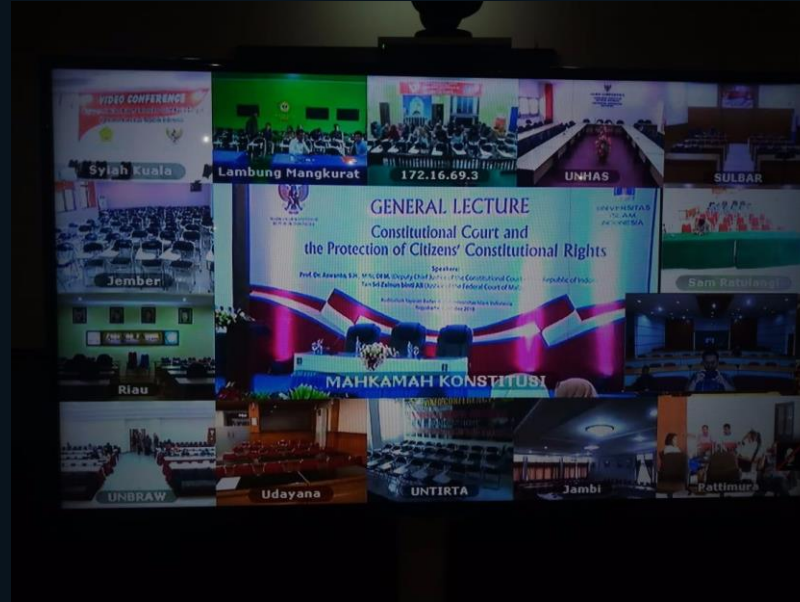
Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)



Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

6 Agustus 2018

Pemanfaatan lain dari fasilitas *Video Conference*



Kuliah Umum /
General Lecture
dan Symposium
Nasional /
International



TERIMA KASIH